BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang – undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah landasan hukum komprehensif yang mengatur hak asasi manusia atas kesehatan, di mana setiap orang berhak hidup sehat fisik, smental, dan sosial. Undang – undang ini menegaskan tanggung jawab pemerintah, hak pasien, pelayanan kesehatan yang merata, serta pengelolaan tenaga Kesehatan dan perbekalan kesehatan secara bertanggung jawab.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ Tahun 2018 tentang Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Peraturan presiden no 72 tahun 2021 tentang startegi pencepatan penurunan stunting, penyelengaraan pencepatan penurunan stunting , koordinasi antara kementrian atau Lembaga pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan pemangku kepentingan.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesehatan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan. Peraturan ini menegaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan

upaya kesehatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan berkesinambungan. Selain itu, pemerintah daerah juga berkewajiban melaksanakan Upaya perbaikan gizi, pelayanan Kesehatan ibu dan anak, serta pemberdayaan Masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan masalah gizi, termasuk stunting.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting sebagai landasan pelaksanaan program penurunan stunting di daerah. Dalam bagian Menimbang dijelaskan bahwa percepatan penurunan stunting dilakukan untuk mewujudkan sumber daya manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sehat, cerdas, dan produktif serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Peraturan ini juga menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, keberhasilan percepatan penurunan stunting memerlukan kerja sama lintas sektor agar upaya pencegahan dan penanganan stunting dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Provinsi Kalimantan Selatan masih menghadapi permasalahan kesehatan yang memerlukan perhatian serius, khususnya terkait stunting. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, prevalensi stunting di Kalimantan Selatan mencapai 22,9%, yang masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 19,8%. Meskipun angka tersebut menunjukkan penurunan

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, stunting tetap menjadi tantangan utama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mewujudkan generasi yang sehat serta produktif di daerah tersebut.

Kabupaten Hulu Sungai Utara masih menghadapi permasalahan stunting yang cukup serius. Berdasarkan hasil Operasi Timbang Kabupaten Hulu Sungai Utara, persentase stunting pada bulan Agustus 2025 sebesar 18,93%, kemudian mengalami penurunan menjadi 18,70% pada bulan Februari 2026. Penurunan sebesar 0,23 poin persentase menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya percepatan penurunan stunting. Namun, angka tersebut masih tergolong tinggi sehingga stunting tetap menjadi masalah kesehatan yang memerlukan perhatian serius. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting perlu terus ditingkatkan agar target penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat tercapai secara optimal dan belum efektif.

Data Prevalensi Stunting di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara keseluruhan mengalami penurunan dari 18,93% pada tahun 2025 menjadi 18,70% pada tahun 2026. Namun kondisi setiap kecamtan berbeda. Kecamatan Babirik mengalami peningkatan tertinggi dari 25,29% menjadi 28.,00%, sedangkan Kecamatan Banjang mengalami penurunan cukup signifikan dari 19,11% menjadi 12,58%. Kecamatan Paminggir mengalami penurunan dari 14,08% menjadi 13,57%. Kecamatan Sungai pandan mengalami penurunan dari 23,56% menjadi 22,68%. Kecamatan Amuntai Selatan menjadi lebih lebih

meningkat dari 22,20% menjadi 22,49%. Kecamatan Danau pangang mengalami peningkatan dari 22,64% tahun 2025 menjadi 22,99% tahun 2026.

Data Prevalensi Stunting di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2007–2026, terlihat bahwa angka stunting secara umum menunjukkan tren menurun meskipun mengalami fluktuasi pada beberapa periode. Prevalensi stunting tercatat sebesar 50,7% pada tahun 2007 dan meningkat menjadi 56% pada tahun 2013, kemudian menurun menjadi 43,6% pada tahun 2014, kembali naik menjadi 53,7% pada tahun 2015, dan turun menjadi 48% pada tahun 2016. Selanjutnya, prevalensi terus mengalami penurunan menjadi 39,4% (2017), 37,74% (2018), 36,61% (2019), dan 20,9% (2021), meskipun sempat meningkat menjadi 28% pada tahun 2022 dan 36% pada tahun 2023. Pada periode berikutnya, angka stunting kembali menurun secara signifikan menjadi 18,31% pada tahun 2024, kemudian relatif stabil pada 18,93% tahun 2025 dan 18,70% tahun 2026. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah memberikan hasil yang positif, ditandai dengan penurunan prevalensi yang cukup besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, meskipun masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga agar angka stunting terus menurun karena ada program – program yang mereka lakukan untuk menurunkan angka stunting.

Kabupaten Hulu Sungai Utara Selain stunting. wasting juga menjadi salah satu permasalahan gizi yang perlu mendapat perhatian karena mencerminkan kondisi gizi kurang akut pada balita. Berdasarkan hasil Operasi Timbang

Kabupaten Hulu Sungai Utara, persentase wasting mengalami penurunan dari 10,18% pada Agustus 2025 menjadi 9,83% pada Februari 2026. Penurunan sebesar 0,35 poin persentase menunjukkan adanya perbaikan status gizi balita. Namun demikian, angka tersebut masih menunjukkan bahwa wasting masih menjadi masalah gizi yang perlu ditangani melalui upaya peningkatan pelayanan kesehatan, pemenuhan gizi, serta keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan.

Kecamatan Banjang masih menghadapi permasalahan stunting yang berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Berdasarkan data Status Gizi Balita UPT Puskesmas Banjang Tahun 2026, terdapat 132 balita stunting (13,61%) dari total 1.985 balita yang diukur. Di antara desa yang ada, Kaludan Besar dan Kaludan Kecil merupakan desa dengan jumlah kasus stunting tertinggi se kecamatan banjang masing-masing sebanyak 19 dan 14 balita. Kondisi ini menunjukkan bahwa stunting masih menjadi masalah kesehatan yang perlu mendapat perhatian serius agar angka stunting dikecamatan tersebut menurun. sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting dalam menurunkan angka stunting di kedua desa tersebut.

Berdasarkan data hasil operasi timbang pada bulan Agustus 2025 dan Februari 2026 di Kabupaten Hulu Sungai Utara, persentase stunting menunjukkan kondisi yang bervariasi pada setiap wilayah kerja puskesmas. Beberapa wilayah mengalami penurunan prevalensi, seperti Sapala (14,08% menjadi 13,57%), Paringin (23,56% menjadi 22,67%), Pasar Sabtu (15,77%

menjadi 14,44%), Sungai Malang (15,51% menjadi 14,77%), Sungai Karias (10,40% menjadi 10,25%), Banjang (19,11% menjadi 12,58%), dan Sungai Turak (15,47% menjadi 14,65%). Sebaliknya, beberapa wilayah mengalami peningkatan, yaitu Danau Panggang (22,64% menjadi 22,99%), Babirik (25,29% menjadi 28,00%), Alabio (21,41% menjadi 21,78%), Amuntai Selatan (22,20% menjadi 22,49%), Guntung (16,80% menjadi 16,98%), dan Haur Gading (20,16% menjadi 22,06%). Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan di sejumlah wilayah, upaya percepatan penurunan stunting masih perlu diperkuat, terutama pada wilayah yang mengalami peningkatan prevalensi.

Data e-PPGBM tahun 2024–2025 jumlah balita stunting di Kabupaten Hulu Sungai Utara menurun dari 2.515 balita menjadi 2.437 balita, namun persentasenya sedikit meningkat dari 18,31% menjadi 18,93%. Jumlah balita wasting juga menurun dari 1.361 menjadi 1.311 balita, dengan persentase meningkat dari 9,94% menjadi 10,19%. Sementara itu, jumlah balita underweight menurun dari 3.223 menjadi 2.807 balita, disertai penurunan persentase dari 23,47% menjadi 21,81%.

Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2024, prevalensi balita stunting menunjukkan adanya penurunan. Pada tahun 2023, prevalensi stunting tercatat sebesar 36%, kemudian menurun menjadi 27,6% pada tahun 2024. Penurunan sebesar 8,4 poin persentase ini menunjukkan adanya perkembangan positif didalam upaya percepatan penurunan stunting, meskipun berbagai program intervensi tetap

perlu diperkuat agar prevalensi stunting terus menurun sesuai target yang ditetapkan pemerintah.

Program Penurunan Stunting merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama berbagai pihak, seperti tenaga kesehatan, pemerintah desa, kader posyandu, keluarga, dan masyarakat, untuk mencegah serta mengurangi angka stunting pada anak. Program ini dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain pemenuhan gizi ibu dan anak, pemberian makanan tambahan (PMT), pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, pelayanan kesehatan, imunisasi, pemberian vitamin, edukasi kepada orang tua, serta perbaikan sanitasi dan lingkungan. Melalui pelaksanaan program tersebut, diharapkan kebutuhan gizi anak dapat terpenuhi, kesehatan ibu dan anak meningkat, serta tumbuh kembang anak dapat berlangsung secara optimal.

Pencegahan stunting dilakukan melalui dua jenis intervensi, yaitu gizi spesifik dan gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik fokus langsung pada pemenuhan gizi, pola asuh, dan pengobatan penyakit, sedangkan intervensi gizi sensitif lebih ke perbaikan lingkungan, akses kesehatan, sanitasi, dan ketersediaan pangan.Upaya ini dilakukan melalui berbagai Program Percepatan Penurunan Stunting dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, seperti Posyandu balita dan ibu hamil, Pemberian Makanan Tambahan (PMT), kelas ibu hamil dan ibu balita, pemantauan pertumbuhan balita, pemberian vitamin A dan imunisasi lengkap, penyuluhan gizi seimbang, serta pendataan dan pendampingan keluarga berisiko stunting. Program-program tersebut bertujuan meningkatkan status gizi dan

kesehatan ibu serta anak, memantau pertumbuhan balita secara berkala, memantau gizi pada balita serta mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan stunting, serta memastikan intervensi diberikan secara tepat sasaran kepada keluarga yang membutuhkan dan layak menerima hak yang seharusnya meraka dapatkan.

Stunting masih menjadi permasalahan kesehatan yang perlu mendapat perhatian di Desa Kaludan Besar dan Desa Kaludan Kecil. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat 19 anak yang mengalami stunting di Desa Kaludan Besar dan 14 anak di Desa Kaludan Kecil. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa kasus stunting masih ditemukan di kedua desa sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanganan yang berkelanjutan. Melalui Program Percepatan Penurunan Stunting, pemerintah desa bersama tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemenuhan gizi, pelayanan kesehatan, serta kesadaran masyarakat agar angka stunting dapat terus menurun dan kualitas tumbuh kembang anak menjadi lebih baik dan masa depanya tidak terhambat.

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis pada anak di 1000 hari pertama kehidupan. Stunting adalah kondisi balita yang memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Balita stunting di masa yang akan datang akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal (Kementerian Kesehatan RI, 2019). Stunting juga dapat memnghambat masa depan anak jadi terancam. Stunting dapat berdampak buruk pada perkembangan anak sehingga mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan produktivitas ekonomi di masa

depan bukan hanya itu masalah stunting kalau tidak diperhatikan akan berdampak sampai mereka dewasa , seperti sering sakit, badan pendek dan daya ingat serta belajarnya juga terhambat. Maka dari itu peneliti menambil penelitian Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi kasus di desa Kaludan Kecil dan Kaludan Besar)

Bedasarkan observasi peneliti terdapat beberapa fenomena masalah dalam Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi kasus di desa Kaludan Kecil dan Kaludan Besar)

1. Koordinasi lintas sektor belum berjalan efektif

   Koordinasi lintas sektor belum berjalan efektif karena masih terdapat kendala dalam pembagian tugas dan wewenang, sinkronisasi perencanaan program, serta kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan. Beberapa pihak belum menjalankan perannya secara optimal sehingga pelaksanaan program masih banyak bergantung pada kader dan tenaga kesehatan. Selain itu, komunikasi dan koordinasi antar pelaksana belum berjalan maksimal komonikasi sangat penting didalam sebuah pekerjaan karena kalau komonikasinya buruk dapat menyebabkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya selaras. Kondisi tersebut mengakibatkan Program Percepatan Penurunan Stunting belum terlaksana secara optimal dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Keterbatasan sumber daya manusia

Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting. Hal ini terlihat dari jumlah sumber daya manusia yang masih terbatas, sehingga pelaksanaan dan pemantauan program belum dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu, sarana dan prasarana yang tersedia belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan kegiatan dikarenakan alat-alat juga termasuk bagian penting dalam pemantaun tumbuh kembang anak. Dari sisi kualitas sumber daya manusia, masih diperlukan peningkatan pengetahuan, pemahaman tentang program kerja, memahami bagian tugas masing- masing, tanggung jawab dan ketulusan sumber daya manusia didalam perkerjaan dan keterampilan melalui pelatihan agar pelaksanaan program lebih efektif. Sementara itu, ketersediaan anggaran yang terbatas juga menjadi kendala dalam mendukung berbagai kegiatan pencegahan dan penanganan stunting secara optimal.

3. Partisipasi masyarakat belum optimal

Partisipasi masyarakat belum optimal terlihat dari masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program stunting. Pada tahap perencanaan, masyarakat belum aktif memberikan masukan atau menghadiri musyawarah terkait program stunting. Dalam pelaksanaan kegiatan, masih banyak ibu hamil, ibu menyusui, dan orang tua balita yang tidak rutin mengikuti posyandu, penyuluhan gizi, maupun pemeriksaan kesehatan. Selain itu, kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap bahaya stunting

masih rendah karena kurangnya pemahaman mengenai dampak stunting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Akibatnya, dukungan masyarakat terhadap program percepatan penurunan stunting belum berjalan secara maksimal.

Jadi, pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara masih menghadapi berbagai kendala, seperti koordinasi lintas sektor yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pencapaian tujuan program dalam menurunkan angka stunting. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan program serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara."

B. Fokus Penelitian

Menurut Howlett, Ramesh, dan Perl (2020) menjelaskan bahwa efektivitas suatu program dipengaruhi oleh kemampuan para pelaksana dalam mengoordinasikan antar lembaga dan berbagai pihak yang terlibat, ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini penulis memfokuskan

kepada beberapa ruang lingkup masalah yang akan dibahas, agar tidak menimbulkan luasnya penafsiran mengenai permasalahan dan pembahasan, sehingga pokok permasalahannya menjadi lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti. Maka dari itu peneliti memfokuskan kepada beberapa aspek efektivitas program dari yang dikemukakan Howlett, Ramesh, dan Perl (2020) menjelaskan bahwa efektivitas program sangat dipengaruhi oleh:

1. Koordinasi Antar Lembaga
2. Ketersediaan Sumber Daya Manusia
3. Partisipasi Masyarakat

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas program percepatan penurunan stunting di kecamatan banjang kabupaten hulu sungai utara?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas program percepatan penurunan stunting di kecamatan banjang kabupaten hulu sungai utara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini :
   a. Untuk mengetaui efektivitas program percepatan penurunan stunting di kecamatan banjang kabupaten hulu sungai utara.

b. Untuk mengetaui faktor `apa yang mempengaruhi efektivitas program percepatan penurunan stunting di kecamatan banjang kabupaten hulu sungai utara.

2. Manfaat Penelitian :

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk meningkatkan Efektifitas program pencepatan penurunan stunting di kecamatan banjang kabupaten hulu sungai utara

1) Manfaat praktis
2) Peneliti dapat mengetahui efektivitas program pencepatan dan penurunan Stunting di kecamatan banjang kabupaten hulu sungai utara.
3) Peneliti mendapatkan wawasan apa yang mempengaruhi efektivitas program percepatan penurunan stunting di kecamatan banjang kabupaten hulu sungai utara.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA AMUNTAI